

## Persepsi Terhadap Kualitas Calon Legislatif (Caleg), Dan Kepercayaan Politik (*Political trust*) dengan Partisipasi Politik.

**Rohana Handaningrum**  
Fakultas Psikologi  
Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya

**Rr. Amanda Pasca Rini**  
Dosen Tetap Fakultas Psikologi  
Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya  
e-mail : amanda.pasca@gmail.com

**Abstract.** *This study aims to determine the relationship of perception of the quality of candidates and political trust with political participation. The population in this study were students at the University August 17, 1945 Surabaya who already have the right to vote or voting rights (age > 17 years or married). While the sample in this study was 150 students, with incidental sampling method. The results of this study were analyzed using multiple regression analysis and resulted in: 1) The relationship between perceptions of quality candidates (candidates) and political beliefs (political trust) with political participation, the value of  $F = 1.056$  with a significance level of  $0.351 > 0.05$ . It can be concluded that this hypothesis is rejected or not proven, that means there is no significant relationship between perceptions of quality candidates (candidates) and political beliefs (Political Trust) with Political Participation. 2) partial test results perceptions of the quality of candidates (X1) with political participation, the value of  $t = 0.297$  and  $0.767$  significance level  $> 0.05$ . This suggests that partial perception of the quality factor candidates (candidates) (X1), there was no significant relationship to political participation (Y). It can be concluded that this hypothesis is not proven or rejected. 3) The results of the partial test of political beliefs (political trust) (X2) with political participation, the value of  $t = -1.424$  and a significance level of  $0.157 > 0.05$ . This suggests that partial political trust factor (X2) there is no significant relationship to political participation (Y). value of R Square (R<sup>2</sup>) of 0.14. R Square value of 0.14 indicates the percentage contribution of the effect of independent variables (perception of the quality of candidates and political beliefs) on the dependent variable (political participation) only by 1.4%, while the remaining 98.6% is influenced by other variables not variables included in the study.*

**Keywords :** *Perception of the quality of candidates, Political trust, Political participation.*

**Intisari.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Persepsi Terhadap Kualitas Calon Legislatif (Caleg), dan Kepercayaan Politik (*Political trust*) dengan Partisipasi Politik. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sudah memiliki hak pilih atau hak suara (usia > 17 tahun atau sudah menikah). Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 150 orang mahasiswa, dengan metode *incidental sampling*. Hasil penelitian ini dianalisa menggunakan analisis regresi berganda dan menghasilkan: 1) Hubungan antara persepsi terhadap kualitas calon legislatif (Caleg) dan kepercayaan politik (*political trust*) dengan partisipasi politik, diperoleh nilai  $F=1,056$  dengan taraf signifikansi  $0,351 > 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini ditolak atau tidak terbukti, yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi terhadap kualitas calon legislatif (Caleg) dan kepercayaan politik (*Political Trust*) dengan Partisipasi Politik. 2) hasil uji parsial persepsi terhadap kualitas Caleg (X1) dengan partisipasi politik, diperoleh nilai  $t=0,297$  dan taraf signifikansi  $0,767 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial faktor persepsi terhadap kualitas calon legislatif (Caleg) (X1), tidak ada hubungan signifikan terhadap partisipasi politik (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini tidak terbukti atau ditolak. 3) Hasil uji parsial kepercayaan politik (*political trust*) (X2) dengan partisipasi politik, diperoleh nilai  $t = -1,424$  dan taraf

signifikansi  $0,157 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial faktor kepercayaan politik (X2) tidak ada hubungan signifikan terhadap partisipasi politik (Y). nilai R Square ( $R^2$ ) sebesar 0,14. Nilai R Square sebesar 0,14 tersebut menunjukkan prosentase sumbangan pengaruh variabel independen (persepsi terhadap kualitas Caleg dan kepercayaan politik) terhadap variabel dependen (partisipasi politik) hanya sebesar 1,4%, sedangkan sisanya sebesar 98,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam variabel penelitian ini.

**Kata Kunci:** Persepsi Terhadap Kualitas Calon Legislatif (Caleg), Kepercayaan Politik (*Political trust*), Partisipasi Politik.

Pemilihan umum adalah salah satu pilar utama dari sebuah demokrasi. Salah satu konsep modern diajukan oleh Joseph Schumpeter (1947) yang menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebut sebagai sebuah demokrasi. Partisipasi politik masyarakat berkaitan erat dengan demokrasi suatu negara. Dalam negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan dan masa depan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk kepemimpinan. Anggota masyarakat secara langsung memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga pemerintahan. Dengan kata lain, partisipasi langsung dari masyarakat merupakan pengejawantahan penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat, keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi sangatlah penting karena teori demokrasi menyebutkan bahwa rakyat sangatlah mengetahui apa yang mereka kehendaki. Hak-hak sipil dan kebebasan dihormati serta dijunjung tinggi. Tiada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, sebab partisipasi merupakan esensi dari demokrasi. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam berpolitik merupakan ukuran demokrasi suatu negara.

Secara normatif demokrasi tersebut dapat kita lihat sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Mochtar, 2003). Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi rakyat adalah rakyat itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi

keputusan yang mempengaruhi hidupnya dengan cara mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam hal ini masyarakat ikut berpartisipasi. Baik ketika dia memilih calon pemimpin atau ikut didalam kampanye maupun partai politik.

Partisipasi politik, menurut Herbet McClosky (Damsar, 2010) dapat diartikan sebagai kegiatan kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Menurut Max Weber masyarakat melakukan aktivitas politik karena, pertama alasan rasional nilai, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok. Kedua, alasan emosional afektif, yaitu alasan didasarkan atas kebencian atau sukarela terhadap suatu ide, organisasi, partai atau individu. Ketiga, alasan tradisional, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu atau tradisi tertentu dari suatu kelompok sosial. Keempat, alasan rasional instrumental, yaitu alasan yang didasarkan atas kalkulasi untung rugi secara ekonomi.

Miriam Budiarto mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Ramlan Surbakti mendefinisikan partisipasi politik itu sebagai kegiatan

warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

Berdasarkan beberapa definisi partisipasi politik yang telah dikemukakan, dapat dilihat bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat merupakan kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap. Dalam sistem pemerintahan, yang berwenang membuat dan melaksanakan keputusan politik adalah pemerintah, akan tetapi masyarakat mempunyai hak untuk mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh pemerintahan tersebut (Sudijono, 1995).

Milbrath dan Goel (Sudijono, 1995) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori perilaku yaitu; 1). *Apartis*, adalah orang-orang yang menarik diri dari proses politik, 2). *Spectator*, yaitu berupa orang-orang yang setidaknya pernah ikut dalam pemilu. 3). *Gladiator*, yaitu orang-orang yang selalu aktif terlibat dalam proses politik. 4). *Pengkritik*, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk konvensional.

Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi ukuran untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu negara. Ada banyak bentuk partisipasi politik itu sendiri, diantaranya melalui pemberian suara (*voting behavior*), diskusi politik, kegiatan kampanye, ikut dalam partai politik dan lain sebagainya. Perilaku politik masyarakat itu sendiri dapat dilihat ketika masyarakat tersebut ikut berpartisipasi, misalnya dalam pemilu.

Pemilu merupakan cara yang paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam demokrasi perwakilan modern. Joko Prihatmoko (2008) menyebutkan bahwa pemilu disebut "bermakna" apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu keterbukaan, ketepatan, dan efektifitas. Sebagai salah satu sarana demokrasi Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang terbuka dan bersifat massal, sehingga diharapkan dapat berfungsi dalam proses pendewasaan dan pencerdasan pemahaman politik masyarakat.

Melalui pemilu akan terwujud suatu infrastruktur dan mekanisme demokrasi serta mem-

bangkitkan kesadaran masyarakat mengenai partisipasi politik. Masyarakat diharapkan pula dapat memahami bahwa fungsi pemilu itu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah, dan pergantian pemerintahan secara teratur (Syamsuddin, 1988).

Indonesia menyelenggarakan Pemilu untuk memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif (DPR/DPRD) serta memilih Presiden dan wakilnya. Partai politik merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik. Partisipasi politik ini merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Demokrasi sebagai suatu sistem politik berupaya untuk memberikan wadah seluas-luasnya kepada rakyat untuk turut berpartisipasi atau ikut serta secara politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dimana dalam hal ini partisipasi politik dapat diartikan sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah (Samuel, 1994).

Partisipasi warga negara dapat dilihat melalui perilaku politiknya. Perilaku politik itu dapat dilihat dari berbagai jenis yaitu melalui partai politik, kampanye, pemberian suara dan lain-lain. Bentuk perilaku politik ini menjadi alat analisis untuk melihat partisipasi politik masyarakat itu sendiri. Bagi pemerintah partisipasi politik dapat dikemukakan dalam berbagai fungsi. Pertama, partisipasi politik masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah. Hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pembangunan. Kedua, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan. Ketiga, sebagai sarana memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan (*ormas*) dan organisasi sosial politik (*orsospol*) merupakan bentuk dari partisipasi politik yang lain.

Rakyat membuat kontrak sosial dengan para pemimpin melalui pemilu. Pada saat pemilu rakyat dapat memilih figur yang dapat dipercaya untuk mengisi jabatan legislative dan ekse-

kutif. Di dalam pemilu, rakyat yang telah memenuhi syarat untuk memilih, secara bebas, dan rahasia, menjatuhkan pilihannya pada figur yang dinilai sesuai dengan aspirasinya. Oleh karena itu, kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin sekarang bukanlah muncul karena dirinya sendiri, melainkan titipan dari rakyat melalui pemilu (Hendarmin, 2007).

Partisipasi politik berkaitan erat dengan kesadaran politik serta kepercayaan politik (*Political Trust*). Sedang keputusan memilih identik dengan penerimaan masyarakat terhadap figur (kualitas individu) yang ditawarkan dalam proses pemilihan anggota legislatif (DPR/DPRD) maupun Presiden dan Wapres.

## METODE

### Sampel

Penelitian ini mengambil sampel dari populasi dengan teknik *incidental sampling*, yaitu mengambil sampel dalam berbagai kesempatan bertemu dengan sampel untuk diminta kesediaannya mengisi alat pengumpul data penelitian. Jumlah sampel penelitian ini 150 orang mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sudah memiliki hak pilih (usia > 17 tahun atau sudah menikah).

### Alat Ukur Penelitian

Untuk mengumpulkan data variabel Partisipasi politik, digunakan Skala Partisipasi politik dalam penelitian ini terdiri dari 53 item (pernyataan) yaitu terdiri item favorable dan unfavorable menggunakan skala likert dimana responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia dengan lima kategori jawaban, yaitu: SS = Setuju, S= Sangat Setuju, T= Tidak tahu/tidak memberikan jawaban/netral, TS = Tidak Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju. Pemberian skor pada aitem favorable dan unfavorable disusun dalam bentuk skala rentang 1 sampai lima dan terdiri dari 5 (lima) alternatif jawaban. Untuk pernyataan favorable pemberian skor bergerak dari kategori jawaban sangat setuju (SS) diberikan skor 5 hingga kategori jawaban sangat tidak setuju (STS) diberikan skor 1. Dan sebaliknya untuk pernyataan unfavorable pem-

berian skor bergerak dari kategori jawaban sangat tidak setuju (STS) diberikan skor 5 hingga kategori jawaban sangat setuju (SS) diberikan skor 1.

Skala kepercayaan politik digunakan untuk mengumpulkan data kepercayaan politik. Data tersebut bisa diungkap dengan menggunakan skala yang mencakup indikator perilaku *political trust* (Burhanuddin Muhtadi, 2013), yaitu : (1) sikap terhadap partai politik, (2) sikap terhadap politisi, (3) Sikap terhadap menteri dan lembaga kementerian (4) Sikap terhadap DPR, (5) sikap terhadap Presiden (6) sikap terhadap berita politik. Skala Kepercayaan Politik (*Political Trust*) dalam penelitian ini terdiri dari 64 aitem (pernyataan) yaitu terdiri item favorable dan unfavorable menggunakan skala likert dimana responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia dengan lima kategori jawaban, yaitu: SS = Setuju, S= Sangat Setuju, T= Tidak tahu/tidak memberikan jawaban/netral, TS = Tidak Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju. Pemberian skor pada aitem favorable dan unfavorable disusun dalam bentuk skala rentang 1 sampai lima dan terdiri dari 5 (lima) alternatif jawaban. Untuk pernyataan favorable pemberian skor bergerak dari kategori jawaban sangat setuju (SS) diberikan skor 5 hingga kategori jawaban sangat tidak setuju (STS) diberikan skor 1. Dan sebaliknya untuk pernyataan unfavorable pemberian skor bergerak dari kategori jawaban sangat tidak setuju (STS) diberikan skor 5 hingga kategori jawaban sangat setuju (SS) diberikan skor 1.

Skala persepsi terhadap kualitas Caleg digunakan untuk mengumpulkan data persepsi terhadap kualitas Caleg. Data tersebut bisa diungkap dengan menggunakan skala yang mencakup indikator perilaku. Dari beberapa indikator yang telah dikemukakan sebelumnya tentang indikator persepsi dari Walgito dan indikator Caleg berkualitas dari Rusli, maka peneliti menyimpulkan bahwa beberapa indikator persepsi terhadap terhadap kualitas Caleg yaitu; 1). Integritas Intektal, 2). Integritas Moral, 3). Integritas sosial.

Skala persepsi terhadap kualitas calon legislatif (Caleg) dalam penelitian ini terdiri dari 53

item (pernyataan) yaitu terdiri item favorable dan unfavorable menggunakan skala likert dimana responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia dengan lima kategori jawaban, yaitu: SS = Setuju, S= Sangat Setuju, T= Tidak tahu/tidak memberikan jawaban/netral, TS = Tidak Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju. Pemberian skor pada aitem favorable dan unfavorable disusun dalam bentuk skala rentang 1 sampai lima dan terdiri dari 5 (lima) alternatif jawaban. Untuk pernyataan favorable pemberian skor bergerak dari kategori jawaban sangat setuju (SS) diberikan skor 5 hingga kategori jawaban sangat tidak setuju (STS) diberikan skor 1. Dan sebaliknya untuk pernyataan unfavorable pemberian skor bergerak dari kategori jawaban sangat tidak setuju (STS) diberikan skor 5 hingga kategori jawaban sangat setuju (SS) diberikan skor 1.

## HASIL

Uji normalitas sebaran, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Adapun cara mengujinya adalah dengan analisis grafik (Ghozali,2005). Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram nilai hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal *probability* plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Dari Uji Normalitas dengan grafik *p-plot*, menunjukkan bahwa titik-titik menyebar disekitar

garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Sehingga garis ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi unsur normalitas.

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui hubungan antar sesama variabel independen, yakni multikolinieritas antara variabel Persepsi terhadap kualitas Caleg dan kepercayaan politik (*Political trust*). Ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan diantaranya yaitu:

- 1) dengan melihat nilai *inflation factor* (VIF), yaitu apabila nilai *tolerance* > 0,30 dan VIF > 0,90 maka tidak ditemukan adanya multikolinieritas pada model regresi.
- 2) Dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual ( $r^2$ ) dengan nilai determinasi secara serentak ( $R^2$ ).
- 3) dengan melihat nilai *eigenvalue* dan *condition index*.

Pada penelitian ini akan dilakukan uji multikolinearitas dengan melihat nilai *inflation factor* (VIF) pada model regresi dan membandingkan nilai koefisien determinasi individual ( $r^2$ ) dengan nilai determinasi secara serentak ( $R^2$ ). Batas dari tolerance value adalah 0,10 atau batas variance inflation factor (VIF) adalah 10. Jika tolerance value diatas 0,10 atau nilai Variance Inflation Factor (VIF) dibawah 10, maka tidak multikolinearitas. Sebaliknya, jika tolerance value dibawah 0,10 atau nilai Variance Inflation Factor (VIF) adalah 10, maka terjadi multikolinearitas. (Ghozali, 2005:92)

Dari hasil uji multikolinieritas pada bagian *Coefficients* yang dianalisa menggunakan program SPSS 14.0 *for Windows*, terlihat nilai VIF sebesar 1,000 (<10) dan nilai *tolerance* 1,000 (> 0,10) pada variabel persepsi terhadap kualitas Caleg dan kepercayaan politik (*political trust*). Berikut adalah hasil uji multikolinieritas;

Uji Autokorelasi, Pengujian autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu pada periode sebelumnya. Untuk

menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat korelasi maka dikatakan bahwa residual acak atau random. Problem autokorelasi disebabkan observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain, sehingga timbul residual tidak bebas dari satu observasi satu ke observasi lainnya. Dengan kata lain, masalah ini seringkali muncul apabila kita menggunakan data runtut waktu. Pendeteksian gejala ini dilakukan dengan menggunakan Uji statistic Durbin-watson, yaitu dengan membandingkan angka Dubin Watson dengan nilai kritisnya. Jika Durbin-watson lebih besar dari nilai kritisnya, maka terjadi autokorelasi. Sebaliknya, jika Durbin-Watson lebih kecil dari nilai kritisnya, maka terjadi autokorelasi. Selanjutnya penelitian dikatakan bebas dari autokorelasi dalam penelitian bila nilai DW berada diantara nilai *du* dan *4-du*. Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS version 14.0 for windows. Berikut adalah hasil pengujian autokorelasi:

Uji Heterokedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dilihat dari grafik *scatter plot* dimana jika titik menyebar secara acak serta tersebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi tersebut. Dari garfik Scatterplot terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak.

Hipotesis pertama menyatakan bahwa ada hubungan antara persepsi terhadap kualitas calon legislatif (Caleg) dan kepercayaan politik (*Political Trust*) dengan Partisipasi Politik Mahasiswa Universitas 17 agustus 1945 surabaya. Berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda diperoleh nilai  $F = 1,056$  dengan taraf signifikansi  $0,351 > 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini ditolak atau tidak terbukti, yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi

terhadap kualitas calon legislatif (Caleg) dan kepercayaan politik (*Political Trust*) dengan Partisipasi Politik.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa ada hubungan antara persepsi terhadap kualitas calon legislatif (Caleg) dengan partisipasi politik pada mahasiswa Universitas 17 agustus 1945 surabaya. Untuk menguji hipotesis kedua, digunakan analisis uji parsial (uji t) untuk mengetahui apakah variabel bebas variabel persepsi terhadap kualitas calon legislatif (Caleg) (X1), dengan partisipasi politik (Y). Dari tabel diatas, dari hasil uji parsial persepsi terhadap kualitas Caleg (X1) dengan partisipasi politik, diperoleh nilai  $t=0,297$  dan taraf signifikansi  $0,767 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial faktor persepsi terhadap kualitas calon legislatif (Caleg) (X1), tidak ada hubungan signifikan terhadap partisipasi politik (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini tidak terbukti atau ditolak.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa ada hubungan antara kepercayaan politik (*political trust*) dengan partisipasi politik pada mahasiswa Universitas 17 agustus 1945 surabaya. Untuk menguji hipotesis ketiga, digunakan analisis uji parsial (uji t) untuk mengetahui apakah variabel bebas kepercayaan politik (X2), dengan partisipasi politik (Y).

Hipotesis kedua menyatakan bahwa ada hubungan antara persepsi terhadap kualitas calon legislatif (Caleg) dengan partisipasi politik pada mahasiswa Universitas 17 agustus 1945 surabaya. Untuk menguji hipotesis kedua, digunakan analisis uji parsial (uji t) untuk mengetahui apakah variabel bebas variabel persepsi terhadap kualitas calon legislatif (Caleg) (X1), dengan partisipasi politik (Y). Hasil uji parsial kepercayaan politik (*political trust*) (X2) dengan partisipasi politik (lihat tabel 4.3), diperoleh nilai  $t= -1,424$  dan taraf signifikansi  $0,157 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial faktor kepercayaan politik (X2) tidak ada hubungan signifikan terhadap partisipasi politik (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini tidak terbukti atau ditolak.

Berdasarkan nilai koefisien korelasi determinasi (R Square) dalam analisis regresi ber-

ganda tersebut diperoleh nilai R Square ( $R^2$ ) sebesar 0,14. Nilai R Square sebesar 0,14 tersebut menunjukkan prosentase sumbangan pengaruh variabel independen (persepsi terhadap kualitas Caleg dan kepercayaan politik) terhadap variabel dependen (partisipasi politik) hanya sebesar 1,4%, sedangkan sisanya sebesar 98,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam variabel penelitian ini.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data di atas, menunjukkan bahwa ada hubungan yang lemah dan tidak signifikan antara persepsi terhadap kualitas calon legislatif (Caleg) (X1) dan kepercayaan politik (*political trust*) (X2) terhadap partisipasi politik (Y). Dimana variabel persepsi terhadap kualitas calon legislatif (Caleg) (X1) yang dan kepercayaan politik (*political trust*) (X2) tidak berpengaruh terhadap partisipasi politik (Y), baik secara parsial maupun bersama-sama atau serentak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi responden (mahasiswa) terhadap Calon Legislatif (Caleg) cenderung negatif atau rendah, begitu pula dengan kepercayaan politik (*political trust*) yang juga menunjukkan hasil yang relatif sama, artinya kepercayaan politik konstituen rendah. Namun gejala politik yang muncul justru bertolak belakang dengan teori yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, karena dalam penelitian ini partisipasi politik justru meningkat ditengah rendahnya kepercayaan politik dan persepsi responden yang cenderung negatif terhadap kualitas calon legislatif (Caleg).

Tingginya angka partisipasi politik pada penelitian ini yang tidak diikuti dengan meningkatnya kepercayaan politik dan persepsi positif terhadap kualitas Caleg yang diusung oleh Parpol dalam Pemilu 2014 tentu memunculkan spekulasi beragam. Karena ini merupakan fenomena yang tidak lazim terjadi dalam iklim politik di Indonesia.

Dilansir dari <http://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html>, Pasca-reformasi Pemilu 1999 tingkat partisipasi memilih 92,6 persen dan jumlah Golput 7,3 persen. Angka partisipasi yang memprihatinkan terjadi pada Pemilu 2004, yakni

turun hingga 84,1 persen dan jumlah golput meningkat hingga 15,9 persen. Pada Pilpres putaran pertama tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 78,2 persen dan jumlah Golput 21,8 persen, sedangkan pada Pilpres putaran kedua tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 76,6 persen dan jumlah golput 23,4 persen. Pada Pemilu Legislatif tahun 2009 tingkat partisipasi politik pemilih semakin menurun yaitu hanya mencapai 70,9 persen dan jumlah golput semakin meningkat yaitu 29,1 persen. Pada Pilpres 2009 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 71,7 persen dan jumlah golput mencapai 28,3 persen.

Begitu pula dengan pemilu 2014, tren menurunnya angka partisipasi politik dan meningkatnya angka Golput diprediksi terus meningkat, berdasarkan survei dari CSIS dan lembaga survei Cyrus Network telah menetapkan persentase pemilih yang enggan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum legislatif 2014. Dari hasil kalkulasi mereka melalui metode penghitungan cepat, tingkat 'golongan putih' pemilu tahun ini hampir menyentuh angka 25 persen. Tingkat partisipasi pemilih 75,2 persen. Sementara yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 24,8 persen. (Philips J. Vermonte, <http://www.Merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html>).

Hal serupa juga diamini oleh Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menyatakan sangat jelas kepercayaan publik kepada parpol menurun. Menurut dia, setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan hal itu. Pertama, meningkatnya *political literacy* atau kesadaran melek politik yang dimiliki publik. Kedua, skeptisisme politik. Banyaknya pemberitaan media atas citra negatif parpol menjadi salah satu faktor pemicunya. Pemilih menjadi kehilangan insentif untuk memberikan suara. Tidak ada lagi dorongan ideologis dari publik atas keberadaan partai dengan aliran-aliran yang dimiliki. Rendahnya Kepercayaan publik kepada parpol terus merosot seiring dengan berbagai kasus korupsi yang menyeret kalangan elit parpol. Jatuhnya kepercayaan publik itu bisa berimbas negatif terhadap partisipasi publik di pemilu legislatif. Ketiga, kegagalan parpol memenuhi janji-janjinya dalam pemilu sebelumnya (<http://www.ti.or.id/index.php/news/2013/03/11/kualitas-caleg-selamatkan-parpol>).

Sementara itu, buruknya persepsi responden terhadap kualitas calon legislatif, dimungkinkan karena sejak Pemilu 2004 silam, orang-orang yang dipilih oleh partai untuk dicalonkan dalam menduduki posisi legislatif boleh dibilang asal-asalan dan dari berbagai profesi dan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sangat bertolak belakang dengan fungsi-fungsi kelegislatifan. Mulai dari fenomena Caleg artis, sampai pada Caleg tukang semir sepatu, tukang tambal ban, badut dan masih banyak lainnya yang membuat masyarakat semakin meragukan kualitas Caleg maupun partai yang mengusungnya.

Proses rekrutmen calon anggota legislatif tersebut adalah menyangkut persoalan kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas calon anggota legislatif kita agar dapat memenuhi fungsi legislatifnya, baik dalam kerangka melaksanakan fungsi representasi, legislasi, anggaran dan pengawasan secara lebih berkualitas. Dalam arti, calon anggota legislatif yang direkrut oleh partai-partai politik kita tidak hanya memenuhi persyaratan umum atau minimal sebagaimana diatur dalam pasal 50 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, namun perlu pula menetapkan syarat-syarat khusus untuk memenuhi aspirasi dan kepentingan masyarakat. Rekrutmen politik yang baik seharusnya dimulai dengan pendidikan politik yang dilakukan secara berkesinambungan oleh partai politik. Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administrative maupun politik

Perekrutan calon anggota legislatif (caleg) adalah salah satu unsur proses demokratisasi yang ikut menentukan tinggi-rendahnya kualitas demokrasi sebuah sistem politik. Semakin baik mekanisme perekrutan caleg semakin baik pula kualitas demokrasi sebuah sistem politik. Dengan memerhatikan kualitas rekrutmen caleg, orang dapat menilai dan menduga kualitas partai politik bersangkutan, politisi yang bakal berkarya di badan legislatif, serta dampaknya terhadap proses pembuatan kebijakan, dan implikasinya terhadap kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh sebagai *outcomes* dari sistem politik demokrasi. Jika salah

satu dari mata rantai proses politik dalam jalur legislatif ini rusak maka bisa diperkirakan bahwa produk-produknya pun akan terimbas termasuk kemampuan dan kualitas produk tersebut dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Oleh karena itu, tahap perekrutan caleg sesungguhnya merupakan tahapan awal yang amat vital perannya dalam keseluruhan proses demokratisasi. Dalam konteks inilah pembahasan tentang isu-isu sekitar perekrutan menjadi menarik untuk dicermati karena dampak jangka panjangnya yang sangat menentukan.

Demikian pula dalam pelaksanaan rekrutmen politik pada partai politik yang mengikuti pelaksanaan pemilu tahun 2014 seharusnya melakukan mekanisme perekrutan calon anggota legislatifnya memperhatikan proses mekanisme perekrutan caleg yang meliputi tahap-tahap penjarangan, fit dan proper test, persyaratan administratif dan penetapan caleg bukan semata mata menentukan calon legislatif yang memiliki basis masa.

Masyarakat sejujurnya tidak hanya apatis dengan kondisi politik bangsa ini, tetapi gejala yang nampak justru lebih dari sekedar apatis, yaitu sikap permisif, masyarakat cenderung acuh dan tidak mau ambil pusing dengan siapapun yang duduk di kursi legislatif, bahkan mungkin juga sudah tidak peduli siapa yang akan memimpin bangsa ini lima tahun kedepan, hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat terhadap maraknya *money politik* menjelang Pemilu. Hampir tidak ada orang yang datang atau “ikut” kampanye atas dasar inisiatif/keinginan pribadi. Hampir semua kampanye digerakkan oleh uang, bahkan satu orang bisa menerima uang lebih dari lima partai untuk datang pada acara-acara kampanye ([okezone.com](http://okezone.com)). Bahkan Masyarakat justru memanfaatkan momentum pemilu sebagai kesempatan untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, sikap permisif inilah yang sengaja ditunjukkan masyarakat sebagai bentuk “*distrust*” atau ketidak percayaannya terhadap segala hal yang bersifat politik.

Kekecewaan para pemilih terhadap kinerja politisi dan partai politik tidak hanya di Indonesia tetapi juga di temukan di amerika serikat dan inggris. Implikasi dari kekecewaan



itu adalah pertama, menurunnya kepercayaan pemilih terhadap elit politik partai. Kedua, kandidat yang di tawarkan partai politik tidak sesuai dengan harapan masyarakat pemilih. Tidak hanya itu, sebagian mahasiswa universitas California pada tahun 1998 menyebutkan hanya 27 persen yang merasa penting untuk mengikuti masalah-masalah politik. Sementara mahasiswa di Inggris, menyebutkan hanya 60-75 persen „tidak tertarik“ atau „tidak terlalu tertarik“ dengan kegiatan politik<sup>2</sup> (Muhtar, 2012).

Menurut Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (2013), ketidakpercayaan publik itu muncul lantaran buruknya citra lembaga politik di mata masyarakat. Hal itu berdasar dari jawaban 2.290 responden yang menyatakan 67% mengaku tidak tertarik dengan politik. Selain itu, kepercayaan masyarakat pada institusi politik juga buruk. Tercermin dari 58% responden yang menyatakan tak percaya partai politik, disusul dengan responden yang tak percaya politisi, menteri-menteri, DPR, dan Presiden. Menurut Burhanuddin, kepercayaan kepada politik kian terpuruk saat masyarakat mengikuti berita politik. Intensitas masyarakat dalam mengikuti berita politik itu dinilai turut memengaruhi buruknya perspektif masyarakat terhadap politik. Tak hanya berdasarkan informasi yang disebarakan melalui surat kabar atau televisi, tapi juga melalui media *online* atau jejaring sosial. Sebanyak 72% responden menyimpulkan bahwa politisi cenderung berbicara tentang kebaikan dirinya. Sementara lainnya, masyarakat pesimistis bahwa politisi akan memenuhi janji politiknya, dan menuding politisi sebagai sekumpulan orang yang mengejar keuntungan pribadi. Khusus bagi pemilih yang mengakses internet, data menunjukkan semakin sering mengakses internet, semakin rendah kepercayaan pada politik, dan semakin jelek pandangan pada politisi. (<http://news.liputan6.com/read/647271/survei-kepercayaan-masyarakat-pada-dunia-politik-terus-turun#sthash.KGhedStf.dpuf>).

Namun demikian, sekali lagi hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh yang tidak lazim karena bertolak belakang dari teori yang sudah ada, dimana rendahnya kepercayaan politik (*political trust*) dan buruknya persepsi terhadap

kualitas calon legislatif tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik yang cenderung tinggi. Responden (Mahasiswa) dalam penelitian ini yang rata-rata adalah pemilih pemula (*beginner voter, undecided voter dan swing voter*).

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang memiliki rentang usia 18-21 tahun dari berbagai fakultas, dan rata-rata adalah pemilih pemula. Pada umumnya mayoritas pemilih pemula adalah pelajar (SMA), mahasiswa dan perkerja muda. Pemilih pemula merupakan pemilih yang sangat potensial dalam perolehan suara pada Pemilu. Suara potensial tersebut setidaknya bisa dilacak dari data dalam dua pemilu terakhir yakni pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Pada Pemilu 2004, ada 50.054.460 juta pemilih pemula dari jumlah 147.219 juta jiwa pemilih dalam pemilu. Jumlah itu mencapai 34 persen dari keseluruhan pemilih dalam pemilu. Jumlah tersebut lebih besar dari pada jumlah perolehan suara partai politik terbesar pada waktu itu, yaitu Partai Golkar yang memperoleh suara 24.461.104 (21,62 persen) dari suara sah. Sementara pada Pemilu 2009 lalu, potensi suara pemilih pemula tetap signifikan (Bakti, 2012).

Besarnya pemilih pemula diperkirakan mencapai 19 persen atau 36 jutaan dari 189 juta penduduk yang memiliki hak pilih. Potensi suara pemilih pemula tersebut tetap lebih besar dibandingkan perolehan suara partai politik terbesar saat itu, yakni Partai Demokrat yang memperoleh 21.655.295 suara. Perolehan suara Partai Demokrat tersebut, jika dihitung berdasarkan suara yang sah dalam pemilu besarnya mencapai 20,81 persen (Bakti, 2012).

Menurut M. Rosyid Dosen Public Relations Politik di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), perilaku pemilih pemula memiliki karakteristik yang biasanya masih labil dan apatis, pengetahuan politiknya kurang, cenderung mengikuti kelompok sepermainan dan mereka baru belajar politik khususnya dalam pemilihan umum. Ruang-ruang tempat di mana mereka belajar politik biasanya tidak jauh dari ruang yang dianggap memberikan rasa Kenyamanan dalam diri mereka. Adapun ruang-ruang tempat belajar politik tersebut yaitu, pertama,

ruang keluarga. Di dalam lingkungan keluarga mereka belajar berdemokrasi pertama kali, faktor keluarga sangat mempengaruhi cara pandang mengenai seluk-beluk kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk pendidikan politik diperoleh pertamakali dari ruang keluarga. Keluarga mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi secara emosional, sehingga faktor orang tua bisa membentuk perilaku pemilih mereka. Kedua, teman sebaya atau *peer group*. Pengaruh teman sebaya atau sepermainan menjadi faktor yang patut dipertimbangkan, karena faktor eksternal ini bisa mempengaruhi informasi dan pendidikan politik. Teman sebaya dipercaya tidak hanya bisa mempengaruhi persepsi dan tindakan positif tetapi juga mempengaruhi persepsi dan tindakan negatif. Sehingga kecenderungan perilaku politiknya berpotensi homogen dengan perilaku politik teman dekatnya. Ketiga, media massa. Media massa terutama televisi mampu menyajikan sumber informasi politik kepada khalayaknya secara efektif dan efisien, dalam hal ini para remaja atau pemilih pemula dalam sehari bisa menghabiskan waktu berjam-jam di depan televisi, (meskipun tidak selalu menonton program yang berkaitan dengan politik), (M.Rosit, <http://osismemilih.web.id/melirik-potensi-pemilih-pemula-pada-pemilu-2014/>)

Menurut George Gerbner (2013), Dekan emiritus dari *Annenberg School for Communication di Universitas Pennsylvania*, bahwa televisi telah menjadi anggota keluarga yang penting, anggota yang bercerita paling banyak dan paling sering. Kalau mereka menghabiskan waktu dalam menonton televisi lebih dari 4 jam perhari, menurut Gerbner, mereka sudah termasuk *heavy viewers* yaitu penonton kelas berat yang mempunyai persepsi bahwa apa yang terjadi di televisi merupakan realitas di sekitarnya. Maka, partai politik atau kandidat yang sering menampilkan dirinya di televisi, sangat berpotensi akan memperoleh perhatian dari pemilih pemula. (<http://liputan6.com/read/2014/02/12/152005/antusiasme-pemilih-pemula-pada-pemilu-2014>).

Pengetahuan politik pemilih pemula sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kelompok pemilih lainnya. Perilaku pemilih masih erat dengan faktor sosiologis dan psikologis dalam menja-

tuhkan pilihan politiknya jika ditinjau dari studi *voting behaviors*. Namun yang membedakan pemilih pemula dan kelompok lainnya adalah soal pengalaman politik dalam menghadapi pemilu. Preferensi yang dijadikan sandaran dalam melakukan pemilihan cenderung tidak stabil atau mudah berubah-ubah sesuai dengan informasi atau preferensi yang melingkarkannya. Faktor yang sangat penting adalah bagaimana pemilih pemula tak menjatuhkan pilihan politiknya karena faktor popularitas belaka. Kecenderungan pemilih pemula akan menaruh simpati kepada kandidat atau caleg dari kalangan selebriti dibandingkan dengan kandidat/caleg non selebriti. Oleh karena itu, segenap komponen atau orang yang memiliki otoritas wajib meliterasi (politik) pemilih pemula supaya menjadi pemilih yang kritis dan rasional (*critical and rational voters*). Artinya dalam menjatuhkan pilihannya bukan karena faktor popularitas, kesamaan etnis dan kedekatan emosional, namun karena faktor rekam jejak, visi misi, kredibilitas dan pengalaman birokrasi. Upaya tersebut adalah bagian dari *political empowerment* bagi warga negara terutama perilaku pemilih pemula dan karena melihat potensi suara pemilih pemula yang signifikan pada Pemilu 2014.

Suara pemilih pemula menjadi penting karena pemilih pemula adalah pemilih yang ikut andil menentukan pemimpin negeri ini tidak hanya pada Pemilu 2014 namun juga pemilu-pemilu selanjutnya. Perilaku pemilih pemula menjadi indikator kualitas demokrasi secara substansial pada saat ini dan masa akan datang. Karena kondisinya masih labil dan mudah diberikan wawasan politik dan demokrasi secara benar baik dari suprastruktur politik maupun infrastruktur politik. Maka pemilih pemula masih terbuka menjadi pemilih yang cerdas dan kritis dalam menentukan pemimpin di Indonesia.

Dilansir dari litbang [kompas.com](http://kompas.com) antusiasme pemilih pemula dipengaruhi keyakinan bahwa pemilu dapat mengatasi persoalan-persoalan kronis bangsa. Korupsi dan kenaikan harga barang merupakan dua masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan menjadi perhatian pemilih pemula (<http://nasional>).

[kompas.com/read/2014/04/08//Antusiasme.Pemilih.Muda](http://kompas.com/read/2014/04/08//Antusiasme.Pemilih.Muda)).

Bukan kali ini saja antusiasme pemilih muda terlihat dalam pemilu. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta putaran kedua tahun 2012 juga menangkap fenomena yang sama. Hasil survei pasca pemilihan (*exit poll*) Litbang Kompas saat itu mengungkap tidak kurang dari 93 persen responden yang merupakan pemilih pemula datang ke tempat pemungutan suara dan memberikan suaranya. Media sosial merupakan wadah yang diakrabi anak-anak muda yang melek teknologi dan menjadi strategi jitu untuk menggerakkan para pemilih muda berbondong-bondong datang ke bilik suara. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran konstituen untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi semakin tinggi.

### KESIMPULAN

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel, dua variabel independen (Persepsi terhadap kualitas Caleg dan kepercayaan politi) dan satu variabel dependen (Partisipasi politik). Adapun subyek dalam penelitian ini adalah 150 orang mahasiswa Untag Surabaya yang sudah memiliki hak pilih (usia > 17 tahun atau sudah menikah). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan skala yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Pengolahan data dalam penelitian ini kemudian dianalisa menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang sudah dirumuskan dalam penelitian ini tidak terbukti. Analisa data menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa Untag surabaya terhadap kualitas Caleg tergolong negatif atau rendah, begitu pula dengan kepercayaan politik mahasiswa Untag Surabaya tergolong rendah, namun kenyataan ini berlawanan dengan tingkat partisipasi politik mahasiswa Untag yang tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang mengatakan bahwa “ada hubungan antara persepsi terhadap kualitas Caleg dan kepercayaan politik, dengan partisipasi politik” tidak terbukti.

Penelitian ini merupakan penelitian partisipasi politik dengan responden mahasiswa yang rata-rata adalah pemilih pemula, secara psikologis preferensi yang dijadikan sandaran dalam

melakukan pemilihan cenderung tidak stabil atau mudah berubah-ubah sesuai dengan informasi atau preferensi yang melingkarinya. Faktor yang sangat penting adalah bagaimana pemilih pemula tak menjatuhkan pilihannya karena faktor popularitas belaka. Kecenderungan pemilih pemula akan menaruh simpati kepada kandidat atau caleg dari kalangan selebriti dibandingkan dengan kandidat/caleg non selebriti. Oleh karena itu, segenap komponen atau orang yang memiliki otoritas wajib melitersi (politik) pemilih pemula supaya menjadi pemilih yang kritis dan rasional (*critical and rational voters*). Artinya dalam menjatuhkan pilihannya bukan karena faktor popularitas, kesamaan etnis dan kedekatan emosional, namun karena faktor rekam jejak, visi misi, kredibilitas dan pengalaman birokrasi. Upaya tersebut adalah bagian dari *political empowerment* bagi warga negara terutama perilaku pemilih pemula dan karena melihat potensi suara pemilih pemula yang signifikan pada Pemilu 2014. Antusiasme pemilih pemula juga dipengaruhi oleh keyakinan (harapan) bahwa pemilu dapat mengatasi persoalan-persoalan kronis bangsa. Korupsi dan kenaikan harga barang merupakan dua masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan menjadi perhatian pemilih pemula (<http://nasional.kompas.com/read/2014/04/08//Antusiasme.Pemilih.Muda>).

### DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, D. (2007). *Membangun Kepercayaan Menuju Indonesia Madani, Demokratis, dan Damai*. <http://ancok.staff.ugm.ac.id>
- Amirul, H. (2007). *Pengaruh Media Terhadap Tingkat Partisipasi Politik*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Antulian, Rifa'i. (2004). *Politik uang jalan pemilihan kepala daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Anoraga, Pandji dan Sri Suryati. (1993). *Perilaku Keorganisasian*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya
- A.Rahman.H.(2007). *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta.: PT. Rineka. Cipta.

- Azwar, S. (1999). *Reliabilitas dan validitas: Seri pengukuran Psikologi*. Yogyakarta: Sigma Alpha.
- Azwar, S. (2000). *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Azwar, S. (2003). *Validitas dan Reliabilitas*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Azwar, S. (2010). *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bismar, A. (2011). *Analisis Penyebab Masyarakat tidak Memilih dalam Pemilu*. Batam : *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*
- Budiharjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik edisi Refisi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Castles, L. (2004). *Pemilu 2004 dalam Konteks Komparatif & Historis*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Croissant, A. (2002). *Majoritarian and Consensual Democracy, Electoral System and Democratic Consolidation in Asia, : Asian Perspectives*.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Elkit, J dkk. (2007). *What Makes Election Free and Fair?. Journal of Democracy*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group,
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The Social Virtues and The Creation Of Prosperity*, New York : the Free Press
- Hadi, S. (1996). *Statistik 2 jilid II*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hadi, S. (1997). *Analisis Regresi*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajahmada.
- Hadi, S. (1996). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hadi, S. (1997). *Metodologi Reasearch*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Hamka. (2002). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rineko Cipta. Hartono.
- Hendarmin R. (2007). *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Bandung : Fokusmedia.
- Huntington P S. & Nelson, Joan. (1994). *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Ivan, M A. (2013). *General Trust dan Kepercayaan terhadap Institusi Publik pada Mahasiswa*. Riau: Fakultas Psikologi UIN Suska.
- Jainuri, (2014). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Joseph S, (1987). *Capitalism, Socialism, and Democracy*. New York : Harper.
- Prihatmoko, J (2008). *Mendemokratiskan Pemilu, dari sistem sampai elemen teknis*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mahfud, Choirul. (2011). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhtar M dan Collin Mac Andrews. (1985). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Miriam B. (1982). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Miriam B. (2010). *Demokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Miriam B, (2013) *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Muhtar M, (2012). *Negara, Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muharam, H. (2006). *Paduan Materi Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaanya di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhtadi, B. (2013). *Perang Bintang 2014*. Bandung: Noura Books.
- Mujani, S. (2007). *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama (Anggota IKAPI).
- Mujani S, William L R, Ambardi K. (2011). *Kuasa Rakyat*. Jakarta : Mizan Publika (Anggota IKAPI).
- Muluk, H. (2010). *Mozaik Psikologi Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi, J dan H. Matini, (2000). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Prihatmoko, J, (2008). *Mendemokratiskan PEMILU*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Pareek, U. (1984). *Perilaku Organisasi*, Jakarta : PT. Pustaka Binama Pressindo.
- Peale, N.V. (1979). *Berfikir Positif*. Jakarta : Gunung Jati.

- Prihatmoko, J. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Rosyid, M. (2014). *Melirik Potensi Pemilih Pemula pada Pemilu 2014*. (<http://osismemilih.web.id/melirik-potensi-pemilih-pemula-pada-pemilu-2014/>)
- Rush, Michael dan Althoff P. (2005). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sadli, S. (1976). *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Yang Menyimpang*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Samuel P, Nealson. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Singarimbun, Masri, dan Sofyan E. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Slameto. (1988). *Belajar & Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Sudijono, S. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Press. [jurnal.dikti.go.id](http://jurnal.dikti.go.id).
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Widia Sarana
- Suryabrata, S. (1991). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : CV. Rajawali
- Syamsuddin H. (1988). *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Walgito, B. (1990). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta : Andi Offset
- Habib. (2007). *Political Trust*. ([http://203.130.242.190// Artikel/1291.shtml](http://203.130.242.190//Artikel/1291.shtml))

